



**PENGARUH STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK TERHADAP
PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN PT. PELINDO 1**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

WINA ANGGRENI

NPM: 1625100373

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WINA ANGGRENI
NPM : 1625100373
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK
TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PT.
PELINDO 1

MEDAN, AGUSTUS 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A)



(Dr. SURYA NITA., S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A)

PEMBIMBING II

(JUNAWAN, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

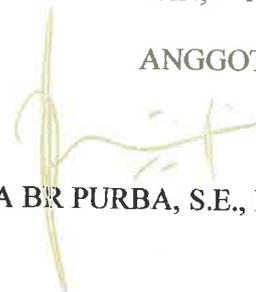
NAMA : WINA ANGGRENI
NPM : 1625100373
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK
TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PT.
PELINDO 1

MEDAN, AGUSTUS 2020

KETUA


(PUJA RIZQY RAMADHAN, SE., M.Si)

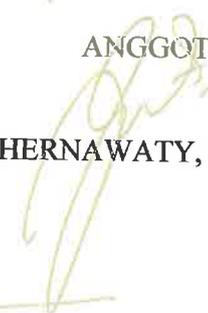
ANGGOTA - I


(RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A)

ANGGOTA - II


(JUNAWAN, SE., M.Si)

ANGGOTA - III


(HERNAWATY, SE., M.M)

ANGGOTA-IV


(BAGUS HANDOKO, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : WINA ANGGRENI
NPM : 1625100373
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK
TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PT.
PELINDO 1

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2020



(Wina Anggreni)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wina Anggreni
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 13 agustus 1991
NPM : 1625100373
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Raya tanjung morawa km.13 no.14, tanjung morawa kab. Deli serdang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, ~~26~~ Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



(Wina Anggreni)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : WINA ANGGERENI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 13 Agustus 1991
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100373
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.11
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan pada PT Pelindo 1 periode tahun 2013-2016	<input type="checkbox"/>
2.	Pengaruh standar audit dan kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT Pelindo 1	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Pengaruh Profitabilitas, current ratio, quick ratio, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan (MBV)	<input type="checkbox"/>

ⓑ: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

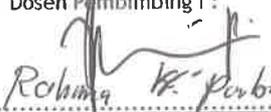

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

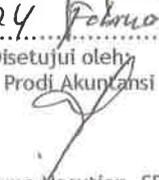
Medan, 24 Februari 2018
 Pemohon,

 (WINA ANGGERENI)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :

 (Dr. Surya Nita, S.Pd., M.Pd.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rohana K. Purba, SE, M.Si, Ak. CA.)

Tanggal : 24 Februari 2018
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Junardi, SE, M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fc@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS
Fakultas
Dosen Pembimbing I
Nama Mahasiswa
Jurusan / Program Studi
No. Stambuk / NPM
Jenjang Pendidikan
Judul Proposal

Universitas Pembangunan Pancabudi
: Sosial Sains
: Rahima Bt Purba, S.E., M.Si, Ak., CA
: Wina Anggreni
: Akuntansi
: 1625100373
: Strata I
: Pengaruh standar audit dan kode etik terhadap
: perkembangan tingkat integritas dalam pemeriksaan
: Laporan Keuangan PT. Pelindo I

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
15/9-2018	Kode etik apa? Teorinya apa → atribusi Objekasi praproposal.		
22/11-2018	Latur Belakng Masalah		
28/11-2018	Acc seminar proposal		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I

Rahima Bt Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Junawan, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : Wina Anggreni
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / NPM : 1625100373
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : Pengaruh standar audit dan kode etik terhadap perkembangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1.

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22/01/2018	Perbaiki Paraf Tebel	JK	
	Perbaiki Paraf Judul Gabar	JK	
28/02/2019	Ace Sam Proposal	JK	

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II


Junawan, S.E., M.Si

Acc Seminar proposal.

28/11-2018.



Acc Seminar Proposal

28/11/2018



**PENGARUH STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK TERHADAP
PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN PT. PELINDO 1**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

WINA ANGGRENI

NPM: 1625100373

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2018**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO. BOX. 1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Pancabudi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A
 Nama Mahasiswa : Vina Angreni
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / NPM : 1625100373
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : Pengaruh standar audit dan kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo I

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
4/12 - 2019	Perbaikan proposal. Bab III.		
9/01 - 2020	Bab IV → hasil statistik. Pembahasan → sesuai dengan jurnal sebelumnya.		
1/2 - 2020	Kesimpulan & Saran.		
4/3 - 2020	Ace Sidang		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I

Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Junawan, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : Wina Anggreni
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / NPM : 1625100373
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : Pengaruh standar akuntansi dan kode etik terhadap perkembangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT Reliance 1

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
04/03/2024	- Pembacaan Proposal Skripsi - Pembacaan Bab I sampai Bab II - Uraian Bab I & II - Tawar-menawar Abstrak		
10/08/2024	Acara Sempit		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Dita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Junawan, S.E., M.Si

Acc Selang
4/2-2020




Acc Selang
10/08/2020

**PENGARUH STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK TERHADAP
PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN PT. PELINDO 1**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

WINA ANGGRENI
NPM: 1625100373

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

Acc jilid lux.
26/1/2021.



Acc Jilid by
Ang 26/1/2021

**PENGARUH STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK TERHADAP
PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS
DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN PT. PELINDO 1**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

WINA ANGGRENI
NPM: 1625100373

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**

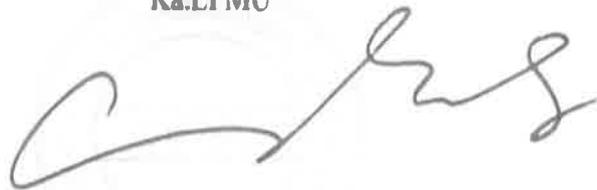
SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



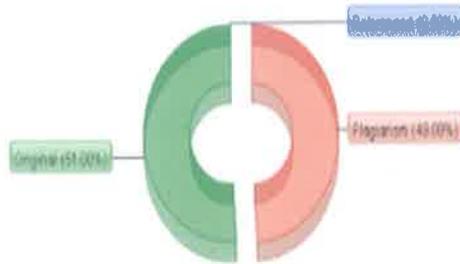
Cahyo Pramono, SE.,MM

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 08/18/20 11:28:49

WINA ANGGRENI 1625100373_Akuntansi(1).docx Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Rotation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

- 13** **words** <https://jocobok.com/peran-peserta-profesionalisme-auditor-rika-heni>
4434
 - 12** **words** <http://bit.ly/qyqz4r-shp-context-plasma2014041-ANALISIS-PROFESIONALISME>
1117
 - 4** **words** <https://id12345.com/document/kelembagaan-gambar-pilka-prefesi-independensi-dan>
6565
- [Show other Sources]

Processed resources (16/16):

165 - Ok / 26 - Failed

[Show other Sources]

Originality score:



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2998/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
atas nama saudara/i:

Nama : WINA ANGGERENI
N.P.M. : 1625100373
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

sehwasannya terhitung sejak tanggal 01 September 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
kaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 01 September 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



ANGGRENI_1625100373_Akuntansi



Kotak Masuk



Wina Anggreni 18 Agt



PLAGIAT CHEKER UNPAB Kemarin

kepada saya



Kepada Sdra/i WINA ANGGRENI

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil plagiat cheker Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dari plagiat checker. Selanjutnya silahkan lapor admin prodi untuk Persyaratan Pembukaan Form Daftar Sidang Di Portal Mahasiswa lalu **kirim kembali ke email plagiat checker Kartu Kemajuan Mahasisa (KKM) / Salinan Nilai dan Bukti Acc Sidang Dari Doping 1 dan 2 (di scan dalam bentuk pdf).**

Terima Kasih

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Subroto km 4,5 Medan
www.pancabudi.ac.id



Balas



Balas ke semua



Teruskan



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 01 September 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINA ANGGERENI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 13 Agustus 1991
 Nama Orang Tua : Hasanul Arifin
 N. P. M : 1625100373
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085275526488
 Alamat : Jl. Tg. Morawa km.13 no.14 Deli Serdang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh standar audit dan kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT Pelindo 1** , Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



WINA ANGGERENI
 1625100373

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : WINA ANGGERENI
N. P. M : 1625100373
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 13 Agustus 1991
Alamat : Jl. Tg. Morawa km.13 no.14 Deli Serdang
No. HP : 085275526488
Nama Orang Tua : Hasanul Arifin/Lely Juni Astri
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh standar audit dan kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT Pelindo 1

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 01 September 2020

embuat Pernyataan



WINA ANGGERENI
1625100373

ABSTRAK

Analisis penelitian untuk mengetahui apakah standar audit dan kode etik secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, dengan pengujian asumsi klasik dan analisis jalur. Sampel sebanyak 32 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar audit dan kode etik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1. Standar audit dan kode etik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1.

Kata Kunci : Standar Audit, Kode Etik dan Pertimbangan Tingkat Materialitas

ABSTRACT

The research analysis to determine whether the audit and ethical standards of the partial and simultaneous ethics have a positive and significant impact on material level considerations in the examination of PT financial statements. 1. The method of analysis used in this study is the associative method, with classical assumption testing and path analysis. A sample of 32 respondents. The results of this study show that audit standards and codes of conduct have a positive and significant impact on material level considerations in examining PT financial statements. Protective 1. Simultaneous audit standards and codes of conduct have a positive and significant impact on material level considerations in the examination of PT financial statements. Protector 1.

Keywords : Audit Standards, Code of Conduct and Material Level Considerations

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Auditing	11
2.1.3 Kantor Akuntan Publik	19
2.1.4 Tahap – Tahap Audit Laporan Keuangan	22
2.1.5 Kode Etik	24
2.1.6 Materialitas	29
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Konseptual.....	33
2.4 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	46

4.1.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	57
4.1.3	Deskripsi Variabel Penelitian.....	58
4.1.4	Pengujian Validitas dan Reliabilitas	67
4.1.5	Pengujian Asumsi Klasik	70
4.1.6	Regresi Linier Berganda	74
4.1.7	Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	75
4.2	Pembahasan.....	77
4.2.1	Pengaruh Standar Audit Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas	77
4.2.2	Pengaruh Kode Etik Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas	78
4.2.3	Pengaruh Standar Audit dan Kode Etik Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.....	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Standar Audit Dan Kode Etik Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Pelindo 1”** ini dengan baik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Junawan, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada teman-temanku, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Agustus 2020
Penulis

Wina Anggreni
1625100373

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pengauditan merupakan serangkaian kegiatan sistematis dan objektif untuk memeriksa laporan keuangan klien yang dilakukan oleh seseorang atau tim yang independen dan kompeten, dalam hal ini dilakukan oleh auditor. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat (opini) dari auditor atas kewajaran suatu laporan keuangan dalam segala hal yang material, dan posisi keuangan hasil usaha serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Sulistia, 2013). Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor dituntut untuk bekerja tidak hanya mengedepankan kepentingan dari kliennya, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dari pihak lain yang merupakan pengguna atas hasil audit dari laporan keuangan perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang telah diaudit tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, peran auditor sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan perusahaan.

Audit atas laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan perseroan terbatas yang bersifat terbuka (PT Terbuka), dikarenakan agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini *stakeholder* perusahaan membutuhkan jasa audit internal seperti Satuan Pengawas Internal dan jasa audit dari pihak ketiga yang independen yaitu auditor eksternal, yang berperan untuk melaksanakan pengujian terhadap kewajaran laporan keuangan

yang telah dibuat oleh manajemen. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor bebas dari salah saji material.

Para auditor baik dari pihak internal maupun pihak eksternal harus dapat mengidentifikasi dan menguji informasi finansial, manajerial dan operasional yang disajikan oleh suatu perusahaan. Para pengguna informasi dan laporan keuangan tentu akan membutuhkan informasi yang relevan dan reliabel, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lebih tegas lagi, dikatakan bahwa informasi mempunyai nilai apabila : menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang atau masa depan, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai (Agus, 2014).

Seorang auditor harus memperhatikan segala hal yang material sebelum mengemukakan pendapat audit karena pendapat yang disampaikan tersebut merupakan representasi dari keadaan perusahaan klien. Meskipun pada kenyataannya auditor tidak dapat menjamin secara mutlak (*assurance*) bahwa hasil audit tersebut bersifat akurat yang dikarenakan auditor tidak dapat memeriksa transaksi yang terjadi, telah dicatat, diringkaskan, digolongkan dan dikomplicasikan secara semestinya kedalam laporan keuangan (Kirana, 2010).

Salah satu cara untuk meminimalisir kesalahan dalam menyatakan pendapat , seorang auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat. *The Financial Accounting Standard Board (FASB)* menerbitkan pedoman dan *issue* yang membahas tentang materialitas. Dalam *issue* tersebut dijelaskan bahwa tidak

ada standar umum untuk materialitas yang dapat diformulasikan dalam rekening, semua pertimbangan yang masuk kedalam kebijakan karena pengalaman auditor.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan suatu pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan. Pertimbangan terhadap mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan.

Para auditor dalam membuat kebijakan mengenai tingkat materialitas harus menentukan terlebih dahulu dalam mengenai batas nilai materilitas, hal ini bermanfaat dalam menentukan apakah adanya salah saji material atau tidak. Semakin kecil tingkat materialitas suatu laporan keuangan yang ditetapkan oleh auditor, maka auditor harus mencari bukti lebih banyak agar auditor memperoleh keyakinan atas audit yang dilakukan.

Berdasarkan observasi dengan pra survei, ada beberapa kasus yang terjadi pada auditor KAP seperti dikemukakan kasus yang terjadi pada PT. Pelindo 1 yang merupakan badan usaha milik Negara. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN ditemukan dugaan kekeliruan penyajian dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (overstatement) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihi sajikan pendapatan pada unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan

harga jasa yang telah diotorisasi oleh direktur bisnis untuk menentukan nilai jasa pada unit distribusi PT. Pelindo 1 per-31 Desember 2017. Selain itu manajemen PT. Pelindo 1 melakukan pencatatan ganda atas pendapatan pada unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal.

Berdasarkan observasi dengan pra survei, auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT. Pelindo 1 per-31 Desember 2017, Bapepam menyimpulkan auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT. Pelindo 1 menggelembungkan keuntungan. Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT. Pelindo 1. Atas temuan ini, kepada PT. Pelindo 1 diberikan sanksi administratif terhadap direksi lama PT. Pelindo 1 dan kepada auditor eksternal.

Dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal pada PT. Pelindo 1, auditor internal juga ikut serta mendampingi sebagai *counterpart* untuk berkoordinasi dengan institusi pengendalian dan *governance* lainnya seperti, Komite Audit dan auditor eksternal. Hal ini sudah diatur dan tercantum dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*).

Syarat utama bagi seorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal adalah profesionalisme. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern (Wahyudi, 2016). Faktor

lainnya yang harus dimiliki oleh auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya adalah integritas. Prinsip integritas mengharuskan seorang auditor untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap kejujuran dan transparansi, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit dan menyampaikan pendapat. Selain profesionalisme dan integritas, seorang auditor juga harus mempunyai pengalaman auditor yang cukup agar dapat membuat keputusan dalam laporan audit. Auditor yang mempunyai pengalaman berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat (Kusuma, 2012).

Auditor eksternal juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh kode etik profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit. (Herawaty, 2010). Kode Etik Auditor mengamanatkan bahwa setiap auditor harus menjunjung tinggi dan mempertahankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan independensi, ia akan bersikap netral dan tidak berpihak serta menghindari terjadinya benturan kepentingan. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan

bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan profesionalitas, ia akan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Standar Audit Dan Kode Etik Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Pelindo 1”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (overstatement) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Salah saji ini terjadi dengan cara melebih sajikan pendapatan pada unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga jasa yang telah diotorisasi oleh direktur produksi untuk menentukan nilai jasa pada unit distribusi PT. Pelindo 1 per-31 Desember 2017.

- b. Manajemen PT. Pelindo 1 melakukan pencatatan ganda atas pendapatan pada unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah hanya pada pengaruh standar audit dan kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah standar audit dan kode etik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1?
- b. Apakah standar audit dan kode etik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk :

- a. Mengetahui apakah standar audit dan kode etik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1.

- b. Mengetahui apakah standar audit dan kode etik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran untuk membuat keputusan bagi parktisi perusahaan.

- b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisa secara khusus, dan pembaca secara umum, mengenai standar audit dan kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

- c. Bagi Peneliti Lainnya

Menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tjandrawinata (2013), dengan judul pengaruh profesionalisme auditor terhadap pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada kantor akuntan publik di Surabaya, sedangkan penelitian ini berjudul: pengaruh standar audit dan kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan

PT. Pelindo 1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada:

1. **Model Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan model regresi linier sederhana, sedangkan penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.
2. **Variabel Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu profesionalisme auditor, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu standar audit dan kode etik, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pertimbangan tingkat materialitas.
3. **Jumlah Data (n)** : penelitian terdahulu menggunakan sampel sebanyak 53 responden. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 responden.
4. **Waktu Penelitian** : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
5. **Lokasi Penelitian** : lokasi penelitian terdahulu di kantor akuntan publik di Surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Pelindo 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi Audit

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Mulyadi, 2012).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah

determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Teori atribusi audit digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perilaku auditor dalam memberikan opini auditor. Dalam teori atribusi audit dikatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan. Teori atribusi dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor yaitu skeptisme profesional yang merupakan kekuatan internal seorang auditor dan independensi sebagai faktor yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar.

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Definisi auditing menurut A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC) adalah: Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memutuskan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi

tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Definisi tersebut mengandung tujuh unsur-unsur penting yaitu (Mulyadi, 2012:9):

1) Suatu proses sistematis

Auditing merupakan suatu proses sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan.

2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Proses sistematis yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak terhadap bukti-bukti tersebut.

3) Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi

Yang dimaksud dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan.

4) Menentukan tingkat kesesuaian

Pengumpulan bukti mengenai asersi dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menentukan

kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

5) Kriteria yang ditentukan

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai asersi (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan-peraturan yang ditetapkan secara spesifik oleh badan legislatif atau pihak lainnya, anggaran atau ukuran prestasi lainnya yang ditetapkan oleh manajemen, atau prinsip akuntansi berlaku umum.

6) Menyampaikan hasil

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan attestasi. Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit. Attestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.

7) Para pemakai yang berkepentingan

Para pemakai yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit adalah para pembuat keputusan yang menggunakannya sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. Para pemakai tersebut antara lain investor maupun calon investor dipasar modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, badan pemerintahan, manajemen, dan publik pada umumnya.

Menurut Tandiontong (2013), Profesi akuntan publik dituntut untuk mengenali kepentingan stakeholder, namun etika profesi tetap terjaga, dalam hal

ini tidak terlepas dari komitmen organisasi dimana profesi akuntan publik bekerja, yakni Kantor Akuntan publik. Skandal akuntansi yang marak terjadi akhir-akhir ini, berakibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan kualitas audit yang dihasilkan.

Selain proses auditing yang dilakukan oleh auditor eksternal, tentunya sangat penting adanya suatu mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban serta kewajaran. Suatu korporasi yang sehat harus taat pada pedoman atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Standar Auditing

Standar auditing adalah salah satu dari lima standar professional yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis (Mulyadi, 2012:35). Boynton (2012: 61) menyatakan bahwa standar auditing yang diakui secara luas dikenal dengan sebutan *the ten generally accepted auditing*, di mana kesepuluh standar menentukan mutu kinerja serta seluruh tujuan yang harus dicapai dalam audit laporan keuangan. Sepuluh standar auditing terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan yang masing-masing akan dijelaskan di bawah ini (Boynton, 2012: 61):

1) Standar Umum

Standar umum berhubungan dengan kualifikasi auditor dan mutu pekerjaan auditor. Standar umum terbagi atas tiga standar yaitu:

a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor (kompetensi auditor). Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

(1) Pendidikan formal untuk memasuki profesi

(2) Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing

(3) Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir professional auditor.

b) Dalam semua hal yang berkaitan dengan perikatan, auditor harus senantiasa menjaga sikap mental independent (independensi auditor). Independensi maksudnya auditor harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan audit serta dalam melaporkan temuanemuannya, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (penggunaan kemahiran professional). Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggungjawab setiap auditor yang bekerja pada suatu KAP untuk mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan sebaik-baiknya. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis

melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan dan pertimbangan yang digunakan oleh mereka yang membantu audit. Standar ini mengharuskan seorang auditor berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan audit pada bisnis klien atau lapangan. Standar pekerjaan lapangan juga terbagi atas tiga standar yaitu:

- a) Pekerjaan harus direncanakan dengan matang dan apabila digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya (perencanaan dan supervisi yang memadai). Perencanaan meliputi pengembangan strategi audit serta rancangan program audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit, sehingga audit dapat dikatakan efektif dan efisien.
- b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh agar dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan (pemahaman atas struktur pengendalian intern). Seorang auditor harus memahami struktur pengendalian intern perusahaan, karena struktur pengendalian intern merupakan faktor yang penting dalam audit. Sebagai contoh, struktur pengendalian internal yang dirancang dengan baik akan mampu melindungi asset klien dan menghasilkan informasi keuangan yang andal.

- c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, observasi, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit (mendapatkan bukti audit yang kompeten). Untuk memenuhi standar ini diperlukan penggunaan pertimbangan professional dalam menentukan jumlah (kecukupan) dan mutu (kompeten) bukti yang mendukung pendapat auditor.

3) Standar Pelaporan

Standar pelaporan merupakan standar yang harus dipenuhi dalam melaporkan hasil audit. Standar pelaporan terbagi atas empat yaitu:

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum).

Standar pelaporan pertama mengharuskan auditor untuk menggunakan prinsip akuntansi berlaku umum sebagai kriteria yang ditetapkan yang digunakan untuk mengevaluasi asersi-asersi dalam laporan keuangan manajemen. Istilah prinsip akuntansi berlaku umum pada standar ini dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, tetapi juga metoda penerapannya.

- 2) Laporan auditor harus menunjukkan keadaan dimana prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip

akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya (konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum).

Untuk memenuhi standar pelaporan, seorang auditor harus mencantumkan secara eksplisit dalam laporan auditor tentang adanya setiap kondisi dimana prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam kaitan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya. Standar ini dirancang untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan dari satu periode ke periode yang lain.

- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor (pengungkapan informasi yang memadai). Standar ini berkaitan dengan kecukupan catatan atas laporan keuangan dan bentuk-bentuk pengungkapan lainnya. Standar ini hanya berpengaruh pada laporan auditor, jika pengungkapan manajemen dianggap tidak mencukupi.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat yang menyeluruh tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan auditor yang dilaksanakan, dan jika ada, tingkat tanggung jawab yang dipikulnya (pernyataan pendapat).

Standar pelaporan mengharuskan auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jenis-jenis pendapat auditor ada empat yaitu:

- a) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- c) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
- d) Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

2.1.3 Kantor Akuntan Publik

2.1.3.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 AE 20000.1 disebutkan bahwa: “Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik.” Dengan kata lain KAP merupakan tempat penyediaan berbagai jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Suatu kantor akuntan yang sudah cukup besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang diberikan, misalnya: bagian audit, jasa manajemen, perpajakan, serta penelitian dan pelatihan. Pembagian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai mengembangkan keahlian mereka ke bagian yang sesuai dengan pengetahuan mereka sehingga memungkinkan pemberian jasa yang lebih baik bagi klien.

2.1.3.2 Syarat Pendirian Kantor Akuntan Publik

Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 yang diubah dengan SK.Menkeu No.470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Pasal 6 SK Menkeu No. 43/1997, izin untuk membuka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berdomisili di wilayah Indonesia.
- 2) Memiliki register akuntan.
- 3) Menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- 4) Lulus ujian sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI.
- 5) Memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3000 jam dengan reputasi baik.
- 6) Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya satu tahun.
- 7) Wajib mempunyai KAP atau bekerja pada Koperasi Jasa Audit.

Menurut hukum Indonesia, ada dua macam bentuk usaha KAP yaitu KAP dalam bentuk usaha sendiri dan KAP dalam bentuk kerjasama. KAP dalam bentuk usaha sendiri menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan sedangkan KAP dalam bentuk kerjasama menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam KAP yang bersangkutan.

2.1.3.3 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik

Umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik di bagi menjadi (Mulyadi, 2012:33):

1) *Partner* (rekan)

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. *Partner* menandatangani laporan audit dan *management letter*, dan bertanggung jawab terhadap penagihan *fee* audit dari klien.

2) Manajer

Manajer bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; mereview kertas kerja, laporan audit dan *management letter*. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior.

3) Auditor senior

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan junior auditor. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilakukan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu.

4) Auditor junior

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai junior auditor, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga dapat memperoleh banyak pengalaman dalam menangani berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut dengan asisten auditor.

2.1.4 Tahap – Tahap Audit Laporan Keuangan

Dalam setiap audit laporan keuangan baik audit pada perusahaan besar maupun pada perusahaan kecil, selalu terdapat empat tahapan kegiatan yaitu (Mulyadi, 2012):

a. Penerimaan perikatan audit

Tahap awal suatu audit laporan keuangan adalah mengambil keputusan untuk menerima (atau menolak) suatu kesempatan menjadi auditor untuk klien baru, atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Enam langkah perlu ditempuh oleh auditor didalam mempertimbangkan penerimaan perikatan audit dari calon kliennya, yaitu:

- 1) Mengevaluasi integritas manajemen
- 2) Mengidentifikasi keadaan khusus dari resiko luar biasa

- 3) Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit
- 4) Menilai independensi
- 5) Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan
- 6) Membuat surat perikatan audit

b. Perencanaan audit

Langkah berikutnya setelah perikatan audit diterima oleh auditor adalah perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Tujuh tahap perlu ditempuh oleh auditor didalam merencanakan pekerjaan audit atas laporan keuangan, yaitu:

- 1) Memahami bisnis dan industri klien
- 2) Melaksanakan prosedur analitik
- 3) Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
- 4) Mempertimbangkan risiko bawaan
- 5) Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama,
- 6) Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
- 7) Memahami pengendalian intern klien

c. Pelaksanaan pengujian audit

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan pengujian audit. Tahap ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus mengacu ke tiga standar auditing yang termasuk dalam kelompok standar pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan lapangan ini adalah

untuk memperoleh bukti audit tentang efektifitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Tahap pelaksanaan pengujian audit ini mencakup sebagian besar pekerjaan audit.

d. Pelaporan audit

Tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke standar pelaporan. Ada dua langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit ini, yaitu:

- 1) Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan.
- 2) Menerbitkan laporan audit.

Dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pada tahap pelaporan audit, auditor meletakkan kepercayaan atas efektifitas pengendalian intern perusahaan. Sebelum melakukan penilaian terhadap efektifitas pengendalian intern, auditor terlebih dahulu harus memperoleh pemahaman atas pengendalian intern yang berlaku didalam perusahaan.

2.1.5 Kode Etik

2.1.5.1 Pengertian Kode Etik

Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara :

- 1) Melaksanakan, mentaati peraturan perundangundangan dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab

- 2) Auditor dengan sekerjanya
- 3) Auditor dengan obyek pemeriksaan
- 4) Auditor dengan masyarakat

Pengertian Kode Etika menurut Firdaus (2015: 35) adalah perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisit. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian besar dihubungkan dengan perilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggung jawab, mencapai yang terbaik dan ketanggugugatan (Firdaus, 2015: 38).

Sebagian besar nilai etika dalam masyarakat tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang karena nilai sifat tertentu yang memerlukan pertimbangan. Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak beretika sebagai perilaku yang berbeda dari sesuatu yang seharusnya dilakukan. Masing-masing orang menentukan apa yang dianggap tidak beretika, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Penting untuk memahami mengapa orang bertindak tidak beretika menurut kita. Ternyata penyebab orang tidak beretika atau standar etika seseorang berbeda dari masyarakat secara keseluruhan atau seseorang memutuskan untuk bertindak semaunya yaitu : standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum, dan seseorang memilih bertindak semaunya.

2.1.5.2 Prinsip Kode Etik Akuntan Publik

Menurut Firdaus (2015: 40), prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntansi Publik adalah sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2) Kepentingan Publik

Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3) Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4) Obyektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi

menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6) Kerahasiaan

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7) Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8) Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.1.6 Materialitas

2.1.6.1 Pengertian Materialitas

Pengertian materialitas menurut Arens (2013:260) adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut. Sedangkan pengertian materialitas menurut Messier (2015:122) adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau memengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut. *Financial Accounting Standard Board* menyebutkan bahwa materialitas merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat

mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Selanjutnya menurut Standar Akuntansi Pemerintahan materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

2.1.6.2 Tahapan Penetapan Materialitas

Penetapan materialitas dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan pemeriksaan, konsep materialitas berperan sebagai pedoman dalam merencanakan program pemeriksaan. Berdasarkan petunjuk teknis BPK RI tentang pemeriksaan laporan keuangan, kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Penentuan Dasar Penetapan Materialitas (*materiality base*)
- 2) Penentuan tingkat materialitas (*rate of materiality*)
- 3) Penetapan Nilai Materialitas Awal (*Planning Materiality/PM*)
- 4) Penetapan Kesalahan Yang Dapat Ditoleransi (*Tolerable Error/TE*)
- 5) Pertimbangan atas Penetapan Materialitas Awal

Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, konsep materialitas berperan sebagai pedoman dalam mengevaluasi bukti-bukti pemeriksaan. Tingkat materialitas yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dapat berubah dengan alasan adanya:

- 1) Perubahan ruang lingkup pemeriksaan,

- 2) Informasi tambahan tentang entitas yang diperiksa selama berlangsungnya pekerjaan lapangan.

Pada tahap pelaporan, materialitas berperan sebagai pedoman dalam menentukan opini atas laporan keuangan yang akan diberikan oleh auditor. Apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material, ia harus memberitahukan hal itu kepada klien, hingga koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan tersebut, pendapat dengan pengecualian atau pernyataan tidak wajar harus diberikan.

2.1.6.3 Pengelompokan Materialitas

Berdasarkan petunjuk teknis BPK RI tentang panduan pemeriksaan laporan keuangan, materialitas dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Materialitas Kuantitatif

Materialitas kuantitatif adalah materialitas yang menggunakan ukuran kuantitatif tertentu seperti nilai uang, jumlah waktu, frekuensi maupun jumlah unit.

- 2) Materialitas Kualitatif

Materialitas kualitatif adalah materialitas yang menggunakan ukuran kualitatif yang lebih ditentukan pada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional tersebut didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu.

2.1.6.4 Indikator Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Arens (2013:265), indikator Pertimbangan Tingkat Materialitas adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa penting materialitas

- 2) Pengetahuan tentang tingkat materialitas
- 3) Risiko audit
- 4) Tingkat materialitas antar perusahaan
- 5) Urutan tingkat materialitas dalam rencana audit

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Tjandrawinata (2013)	Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada kantor akuntan publik di Surabaya.	Profesionalisme Auditor (X) Pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y)	Regresi Linier Sederhana	Penelitian ini menghasilkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada kantor akuntan publik di Surabaya.
2	Basri (2011)	Pengaruh Dimensi Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor di KAP Kota Makassar).	Dimensi Profesionalisme Auditor (X) Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)	Regresi Linier Sederhana	Penelitian ini menghasilkan bahwa Dimensi Profesionalisme Auditor berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor di KAP Kota Makassar).
3	Sadewo (2018)	Pengaruh Etika Profesi Dan Kompetensi Audit Terhadap Kualitas Audit di Kap Semarang.	Etika Profesi (X1) Kompetensi Audit (X2) Kualitas Audit (Y)	Regresi Linier Berganda	Penelitian ini menghasilkan bahwa Etika Profesi Dan Kompetensi Audit berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Audit di Kap Semarang.
4	Tandiontong (2013)	Pengaruh Faktor Komitmen Profesi	Komitmen Profesi Akuntan	Regresi Linier	Penelitian ini menghasilkan bahwa

		Akuntan, Komitmen Organisasi Kantor Akuntan Publik Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Implementasi Audit Independen Atas Laporan Keuangan. Survei terhadap Akuntan yang bekerja sebagai Auditor pada KAP di Indonesia	(X1) Komitmen Organisasi Kantor Akuntan Publik (X2) Kepuasan Kerja Auditor (X3) Implementasi Audit Independen Atas Laporan Keuangan (Y)	Berganda	(1) komitmen profesi akuntan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas implementasi audit independen atas laporan keuangan; (2) komitmen Kantor Akuntan Publik berpengaruh dalam meningkatkan kualitas implementasi audit independen atas laporan keuangan; (3) Kepuasan Kerja Auditor berpengaruh dalam meningkatkan kualitas implementasi audit independen atas laporan keuangan; (4) komitmen profesi akuntan, komitmen organisasi KAP, dan Kepuasan Kerja Auditor secara bersama-sama berpengaruh dalam meningkatkan implementasi audit independen atas laporan keuangan. Dengan demikian baik secara parsial maupun secara silmultan, implementasi audit independen atas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor komitmen profesi akuntan, komitmen organisasi KAP, dan Kepuasan Kerja Auditor.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

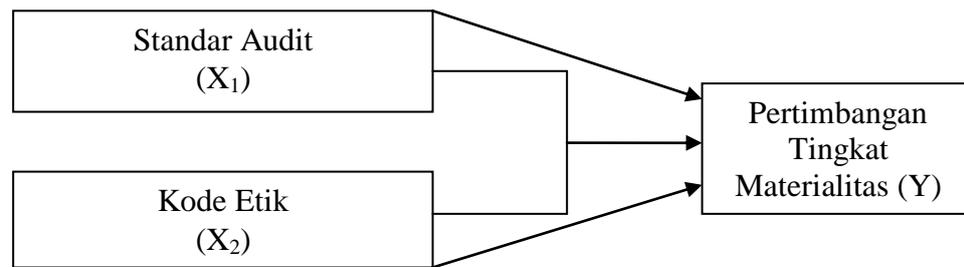
Sumber : Diolah Penulis (2020)

2.3 Kerangka Konseptual

Auditor eksternal juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh kode etik profesi yang

sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit. (Herawaty, 2010). Kode Etik Auditor mengamanatkan bahwa setiap auditor harus menjunjung tinggi dan mempertahankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan independensi, ia akan bersikap netral dan tidak berpihak serta menghindari terjadinya benturan kepentingan. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan profesionalitas, ia akan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesidengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto, 2013). Oleh karena itu diperlukan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang disebut kode etik. Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan dalam model ini adalah sebagai berikut: :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Penulis 2020

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Standar audit dan kode etik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1.
2. Standar audit dan kode etik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian asosiatif. Menurut Juliandi (2013:123) pendekatan asosiatif adalah pendekatan korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pelindo 1.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020, dengan format berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan											
		Mei 2020			Juni 2020			Juli 2020			Agustus 2020		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Seminar Proposal				■								
4	Perbaikan Acc Proposal					■	■						
5	Pengolahan Data							■	■				
6	Penyusunan Skripsi									■			
7	Bimbingan Skripsi										■	■	
8	Meja Hijau												■

Sumber: Penulis (2020)

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama standar audit (X_1) dan variabel bebas kedua kode etik (X_2), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pertimbangan tingkat materialitas (Y).

3.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala
Standar audit (X_1)	Pedoman audit atas laporan keuangan historis. (Mulyadi, 2012:35)	1. Standar Umum 2. Standar Pekerjaan Umum 3. Standar Pelaporan	Skala likert
Kode Etik (X_2)	Perangkat prinsip moral atau nilai. (Firdaus, 2015:35)	1. Melaksanakan, mentaati peraturan perundangundangan dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab. 2. Auditor dengan sekerjanya. 3. Auditor dengan obyek pemeriksa. 4. Auditor dengan masyarakat	Skala likert
Pertimbangan tingkat materialitas (Y)	Jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut. (Arens, 2013:260)	1. Seberapa penting materialitas 2. Pengetahuan tentang tingkat materialitas 3. Risiko audit 4. Tingkat materialitas antar perusahaan 5. Urutan tingkat materialitas dalam rencana audit	Skala likert

Sumber: Penulis (2020)

3.4 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2011:66), populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor PT. Pelindo 1 sebanyak 32 responden.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2011:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel bila jumlah populasi tersebut relatif kecil atau kurang dari 100 orang. Sugiyono (2011:68). Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 responden.

3.4.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang dipilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan cara memberikan kuesioner dan melakukan wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang

bersifat lisan maupun tulisan. Dalam memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, kuesioner akan disebarkan kepada responden.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Maka wawancara akan dilakukan kepada responden.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis dan dievaluasi, terlebih dahulu data tersebut diuji dengan:

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2011:182), uji validitas merupakan kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. maka diperlukan uji validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30 maka butir pertanyaan dianggap valid. Kriteria dalam menggunakan validitas kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan dinyatakan valid
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Realibilitas (kehandalan)

Menurut Sugiyono (2011:109), uji reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu instrument penelitian. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab butir-butir berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang disusun dalam bentuk quisioner. Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih besar ($>$) 0,60.

Berdasarkan data yang telah didapat kemudian diolah dan dianalisa selain menggunakan rumus diatas dapat dihitung dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 16.0 atau bantuan aplikasi *Software SPSS 16.0 For Windows*.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Menurut Situmorang (2014:114), Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi

pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jika hasil regresi telah memenuhi asumsi-asumsi regresi maka nilai estimasi yang diperoleh akan bersifat BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*). BLUE adalah asumsi yang dikembangkan oleh *Gauss Markov Theorem*. Sebelum melakukan analisis regresi, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Situmorang (2014:62), uji normalitas, bertujuan untuk mengetahui suatu distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng dan distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Grafik dan Pendekatan Kolmogorov Smirnov. Dengan menggunakan tingkat Signifikan 5 % (0,05) maka, jika nilai Asymp Sig (2-tailed), diatas nilai signifikan 5 % (0,05) artinya Variabel residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Situmorang (2014:68), uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui dalam sebuah model regresi ada tidaknya gejala korelasi antar variabel independen Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) melalui program SPSS. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai tolerance $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 , maka tidak

terjadi multikolinearitas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* melalui SPSS dengan ketentuan :

- i. Bila $VIF > 10$ dan $Tolerance < 0,1$ maka terdapat masalah multikolinearitas.
 - ii. Bila $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.
- c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji data residu tidak bersifat acak. Residu yaitu variabel-variabel lain yang terlibat akan tetapi tidak termuat di dalam model sehingga residu adalah variabel tidak diketahui sehingga di asumsikan bersifat acak. Karena diasumsikan acak, maka besarnya residu tidak terkait dengan besarnya nilai prediksi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas juga pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varian yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varian sama dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homoskedastisitas, sedangkan jika varian tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot yang disajikan, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebut baik

diasas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independenya. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar dibawah angka 0 dan y, maka tidak heteroskedastisitas.

3.6.3 Regresi Linier Berganda

Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Peneliti menggunakan bantuan program *SPSS 16,0 for windows* agar hasil yang diperoleh lebih terarah. Menurut Situmorang (2014:166) digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas (standar audit dan kode etik) terhadap variabel terikat (pertimbangan tingkat materialitas), dengan rumus :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Pertimbangan Tingkat Materialitas (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Standar Audit (*Independent Variabel*)

X_2 = Kode Etik (*Independent Variabel*)

ϵ = Error term

3.6.4 Uji Kesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari semua variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diuji dengan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 5\%$. Pada uji F, dengan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% dengan $\alpha = 0.5\%$, apabila hasil perhitungan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebasnya bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebasnya secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian hipotesis secara serempak adalah sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan statistik t (uji t). Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) bertujuan untuk mengetahui signifikansi variabel. Koefisien determinasi melihat seberapa besar pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Koefisien determinan (R^2) berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), ($0 < R^2 < 1$). Apabila determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel *independent* terhadap pengaruh variabel *dependent* semakin kecil. Hal ini berarti, model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* dan bila R^2 mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel *independent* adalah besar terhadap variabel *dependent*. Hal ini berarti, model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel *independent* yang diteliti terhadap variabel *dependent*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat PT. Pelindo 1

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan Akte Notaris Imas Fatimah SH No. 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 8612 Tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI Tanggal 2 Januari 1999 No. 1 Nama lengkap perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) disingkat PT Pelindo I (Persero).

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awalnya masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama "*Haven Bedrijf*". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I

berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan Departemen Perhubungan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

Pengelolaan Pelabuhan Umum di Indonesia sejak tahun 1960 dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah pengendalian pemerintah. Adapun bentuk BUMN yang diberi kewenangan untuk mengelola Pelabuhan Umum tersebut mengalami beberapa perubahan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta mengimbangi pertumbuhan permintaan pelayanan jasa pelabuhan yang dinamis. Bentuk perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pejabat Haven Bedrijf Periode 1945-1950

Menurut catatan yang ada, yang memegang pinjaman atau dengan nama *Dedirecteurder Haven* pada Periode 1945-1950 tercatat sebagai berikut:

- a) Tahun 1945-1946 : Achmad Mardjuki
- b) Tahun 1946-12 April 1949 : Ir. JJM Dorbech
- c) 12 April 1949-02 Oktober 1950 : Mr. G. C. Hardenberg

2) Jawatan Pelabuhan

Pada tahun 1961, nama *Haven Bedrijf* diubah menjadi *Jawatan Pelabuhan*. Pimpinan pada jawatan pelabuhan ini adalah *Direktur Pelabuhan*.

a) Perusahaan Pelabuhan Negara

Pada periode tahun 1956-1961, nama *Pelabuhan Jawatan* diganti lagi dengan nama *Perusahaan Pelabuhan Negara* dengan pejabat pimpinan disebut *Direktur Perusahaan Pelabuhan Negara*.

b) Perusahaan Negara Pelabuhan (P.N. Pelabuhan)

Pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 Lembaran Negara No. 128 tahun 1961, nama Perusahaan Pelabuhan Negara diganti lagi menjadi Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I dengan pejabat pimpinannya disebut P. N. Pelabuhan.

c) PP No. 18/1964 Merubah Sistem Organisasi Pelabuhan.

Sistem organisasi kepelabuhanan berubah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1964. Pengusaha tunggal dipelabuhanan adalah “Komandan Penguasa Pelabuhan” yang didalamnya tergabung Syahbandar sebagai staff operasi dan P. N. Pelabuhan sebagai staff service.

d) Penguasa Pelabuhan (Port Authority) menjadi Administrator Pelabuhan

Setelah perubahan struktur organisasi di pelabuhan berdasarkan PP No. 1 tahun 1969 dan PP No. 18/1969, nama Penguasa Pelabuhan (Port Authority) diubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Pada Tanggal 17 Juli 1969 dilakukan serah terima Penguasa Pelabuhan (Port Authority) Belawan dari Kol. Soejono Hamijoyo yang ketika itu merangkap sebagai Kepala Daerah Pelayaran I kepada Drs. Soemantri sebagai pejabat administrator Pelabuhan Belawan yang pertama dengan disaksikan oleh Menteri Perhubungan RI Frans Reda.

e) Badan Pengusaha Pelabuhan menjadi Perusahaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1983, pelabuhan sebagai salah satu unsur penunjang kelancaran angkutan laut telah ditata kembali. Seluruh pelabuhan yang diusahakan di wilayah nusantara dibagi dalam 4 (empat) kelompok yang pengusahaannya diselenggarakan secara profesional dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen serta prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum (Perum) di lingkungan Departemen Perhubungan.

f) Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 56 tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang perubahan status Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada ditangan

Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

b. Jejak Langkah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Tabel 4. 1 Jejak Langkah PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1960	Jawatan Pelabuhan berubah menjadi PN Pelabuhan
1969	PN Pelabuhan berubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP)
1970	Berdirinya Unit Galangan Kapal (UGK)
1983	BPP menjadi Perumpul I
1987	Di operasikan BICT (Belawan International Container Terminal)
1991	Perumpul I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
1994	Operasi Terminal Curah Cair Di Pelabuhan Belawan
2005	Berdirinya Unit Depo Peti Kemas (UDPK)
2008	Dioperasikan Terminal Curah Cair Dumai
2012	Dioperasikannya Terminal Kontainer Perawang
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pelabuhan Batam berubah menjadi Cabang Pelabuhan Batam 2. Berdirinya PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) sebagai anak perusahaan patungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) 3. Berdirinya PT Prima Terminal Petikemas (PTP) sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 4. Kawasan Pelabuhan Gunung Sitoli menjadi Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli
2014	Berdirinya PT Prima Indonesia Logistik dan PT Prima Multi Terminal
2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Launching Logo Baru Pelindo I pada tanggal 17 Agustus 2015 2. Berdirinya PT Prima Pengembang Kawasan

2016	Perusahaan melakukan transformasi dengan fokus pada nilai dan budaya Perusahaan, yang salah satunya dengan melahirkan roadmap di bidang sumber daya manusia.
2017	Berdirinya PT Prima Husada Cipta Medan

Sumber: www.pelindo1.co.id

c. Anak Perusahaan

Anak Perusahaan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah:

Tabel 4. 2 Anak Perusahaan

No	Anak Perusahaan
1	PT Terminal Petikemas Indonesia
2	PT Prima Terminal Petikemas
3	PT Prima Indonesia Logistik
4	PT Prima Multi Terminal
5	PT Prima Pengembangan Kawasan
6	PT Prima Husada Cipta Medan

Sumber: www.pelindo1.co.id

d. Wilayah Kerja

Wilayah kerja usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara (Sumut), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Wilayah Kerja

NO	Cabang Pelabuhan	Kelas Cabang	Kawasan
1	Belawan	Utama	Pangkalan Susu/Brandan
2	Dumai	Kelas I	a. Bagan Siapi-api b. Bengkalis
3	Belawan International Container Terminal	Kelas I	-
4	Terminal Petikemas Domestik Belawan	Kelas I	-
5	Tanjung Pinang	Kelas II	a. Sei Kolak Kijang b. Tanjung Uban
6	Pekan Baru	Kelas II	Rengat
7	Tanjung Balai Karimun	Kelas II	Selat Panjang
8	Kuala Tanjung	Kelas II	-
9	Batam	Kelas III	Pulau Sambu

10	Sei Pakning	Kelas III	-
11	Sibolga	Kelas III	-
12	Malahayati	Kelas IV	Meulaboh
13	Lhokseumawe	Kelas IV	Kuala Langsa
14	Tanjung Balai Asahan	Kelas IV	-
15	Tembilahan	Kelas V	a. Kuala Enok b. Rengat
16	Gunung Sitoli	Kelas V	-

Sumber: www.pelindo1.co.id

e. Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan dan Logo Perusahaan

1) Visi

Menjadi nomor satu di Bisnis Kepelabuhanan di Indonesia. Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pengelola terminal peti kemas dengan throughput terbesar di Indonesia, yang ditarget akan terwujud pada tahun 2023. Cita-cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi Perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.

2) Misi

- a) Menyediakan jasa kepelabuhanan yang terintegrasi, berkualitas dan bernilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Visi dan Misi Perusahaan tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2014-2018 dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

4.1.2 Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi PT. Pelindo 1

Organisasi kantor pusat dipimpin oleh direktur yang sekaligus pimpinan perseorangan yang bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Direksi merupakan suatu dewan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari:

1. Direktur Utama : DIAN RACHMAWAN
2. Direktur Keuangan : M. NUR SODIQ
3. Direktur Bisnis : SYAHPUTERA SEMBIRING
4. Direktur SDM dan Umum : M. HAMIED WIJAYA
5. Direktur Perencanaan dan Pengembangan : HOSADI APRIZA PUTRA

Struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No.PR.02/1/21/P.I-09 tanggal 23 Maret 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Adapun uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian serta bidang-bidang yang ada pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

a. **Direktur Utama**

Tugas dari direktur utama adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dan atas nama direktur serta mewakili perseroan menerima petunjuk dari yang bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- 2) Melakukan tugas-tugas pokok perusahaan dan lain-lain.
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan direksi yang dilakukan oleh para direktur.

b. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan kegiatan bidang akuntansi, manajemen, perbendaharaan, akuntansi keuangan serta kemitraan dan bina lingkungan sesuai kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Direktur keuangan membawahi bidang, yaitu:

- 1) Bidang Akuntansi Manajemen
- 2) Bidang Perbendaharaan
- 3) Bidang Akuntansi Keuangan
- 4) Bidang Kemitraan & Bina Lingkungan

c. Direktur Bisnis

Direktur Bisnis mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan kegiatan bidang bisnis pelayanan jasa kepelabuhanan. Direktur Bisnis membawahi bidang, yaitu:

- 1) Bidang Pemasaran
- 2) Bidang Bina Usaha
- 3) Bidang Pelayanan Kapal dan Barang
- 4) Bidang Peralatan
- 5) Bidang Fasilitas
- 6) PMO Pengembangan Terminal Petikemas Perintis
- 7) PMO Pembinaan Pelabuhan Belawan

d. Direktur SDM dan Umum

Direktur SDM dan Umum mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang perencanaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, memelihara hubungan ketenagaan, administrasi sumber daya manusia serta administrasi umum sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Direktur SDM dan Umum membawahi bidang, yaitu:

- 1) Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- 2) Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
- 3) Bidang Umum
- 4) Bidang Hukum
- 5) PMO Pendirian Anak Perusahaan
- 6) PMO Penyelesaian Permasalahan Hukum
- 7) PMO *Change Management*
- 8) *Shared Service Unit*

e. Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Direktur Perencanaan dan pengembangan Usaha (PPU) mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan bidang perencanaan, pengembangan usaha, teknologi informasi, perencanaan teknik dan konstruksi serta sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Direktur Perencanaan dan Pengembangan membawahi bidang, yaitu:

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha
- 2) Bidang Teknologi Informasi
- 3) Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu
- 4) PMO Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

- 5) PMO Pengembangan Selat Malaka di Batam
- 6) PMO Pengelolaan Alur Pelayaran

f. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Satuan Pengawasan Internal (SPI) mempunyai tugas membantu direktur utama dalam melakukan penilaian secara independen atas sistem pengendalian pengolahan perusahaan dan penilaian atas pelaksanaan pengolahan melalui pemeriksaan keuangan dan operasional pada kantor pusat, cabang-cabang pelabuhan dan unit di lingkungan perusahaan serta memberikan laporan dan saran-saran perbaikan kepada direktur utama dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang efisien, efektif dan ekonomis dalam rangka mendorong penerapan *Good Corporate Governance* (Perusahaan Pemerintah yang baik).

1) *Corporate Secretary*

Corporate Secretary mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja dan menyelenggarakan kegiatan, hubungan internasional, kehumasan, kesekretariatan, direksi dan hubungan antara lembaga dalam pencapaian tujuan perusahaan.

2) Biro Logistik

Biro Logistik mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan pengembangan sistem logistik perusahaan yang meliputi pengadaan, pembekalan, pendistribusian dan pengadaan bidang teknik dan non teknik serta pengolahan administrasi pengadaan barang dan jasa.

3) *Strategic Management Office (SMO)*

Strategic Management Office (SMO) terdiri dari SMO perencanaan strategis dan SMO manajemen peningkatan kinerja.

g. Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berbentuk fungsional dan kekuasaan tertinggi terletak pada direktur utama. Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur Organisasi Non Direktorat
- 2) Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
- 3) Struktur Organisasi Direktorat Keuangan
- 4) Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia dan Umum
- 5) Struktur Organisasi Direktorat Bisnis

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.4
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	22	68.8	68.8	68.8
Perempuan	10	31.2	31.2	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa mayoritas responden PT. Pelindo 1 yang menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 68.8% dari total responden.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

Tabel 4.5
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20 - 30 Tahun	8	25.0	25.0	25.0
31 - 40 Tahun	19	59.4	59.4	84.4
41 - 50 Tahun	5	15.6	15.6	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden PT. Pelindo 1 yang menjadi responden berusia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 59.4% dari total responden.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Tabel 4.6
Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S1	19	59.4	59.4	59.4
S2	13	40.6	40.6	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa mayoritas responden PT. Pelindo 1 yang menjadi responden memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 59.4% dari total responden.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini 1 (satu) variabel bebas yaitu: standar audit (X_1) dan variabel bebas kedua kode etik (X_2), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pertimbangan tingkat materialitas (Y). Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 61 orang. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Setuju (S) dengan skor 4
- c. Ragu-Ragu (RR) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

a. Variabel X₁ (Standar Audit)

Tabel 4.7
Untuk melakukan audit yang baik saya perlu mengetahui jenis industry klien.

Pernyataan X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
	Ragu-Ragu	13	40.6	40.6	50.0
	Setuju	12	37.5	37.5	87.5
	Sangat Setuju	4	12.5	12.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (12.5%), setuju sebanyak 12 orang (37.5%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (40.6%) dan sebanyak 3 orang (9.4%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 13 orang (40.6%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa untuk melakukan audit yang baik saya perlu mengetahui jenis industry klien.

Tabel 4.8
Auditor harus memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pernyataan X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	9	28.1	28.1	28.1
	Ragu-Ragu	5	15.6	15.6	43.8
	Setuju	18	56.2	56.2	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 18 orang (56.2%), ragu-ragu sebanyak 5 orang (15.6%) dan sebanyak 9 orang (28.1%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 18 orang (56.2%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa auditor harus memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tabel 4.9
Auditor harus memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis.

Pernyataan X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	18.8	18.8	18.8
	Ragu-Ragu	9	28.1	28.1	46.9
	Setuju	15	46.9	46.9	93.8
	Sangat Setuju	2	6.2	6.2	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.2%), setuju sebanyak 15 orang (46.9%), ragu-ragu sebanyak 9 orang (28.1%) dan sebanyak 6 orang (18.8%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (46.9%). Jadi dapat disimpulkan responden

setuju bahwa auditor harus memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis.

Tabel 4.10
Untuk melakukan audit yang baik saya membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari tingkat Pendidikan Strata (D3, S1, S2, S3) dan dari kursus serta pelatihan.
Pernyataan X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	10	31.2	31.2	31.2
	Ragu-Ragu	9	28.1	28.1	59.4
	Setuju	10	31.2	31.2	90.6
	Sangat Setuju	3	9.4	9.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (9.4%), setuju sebanyak 10 orang (31.2%), ragu-ragu sebanyak 9 orang (28.1%) dan sebanyak 10 orang (31.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan tidak setuju sebanyak 10 orang (31.2%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan tidak setuju bahwa untuk melakukan audit yang baik saya membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari tingkat Pendidikan Strata (D3, S1, S2, S3) dan dari kursus serta pelatihan.

b. Variabel X₂ (Kode Etik)

Tabel 4.11
Dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
Pernyataan X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	6.2	6.2	6.2
	Ragu-Ragu	7	21.9	21.9	28.1
	Setuju	9	28.1	28.1	56.2
	Sangat Setuju	14	43.8	43.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang (43.8%), setuju sebanyak 9 orang (28.1%), ragu-ragu sebanyak 7 orang (21.9%) dan sebanyak 2 orang (6.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang (43.8%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Tabel 4.12
Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap organisasi intern.
Pernyataan X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	4	12.5	12.5	12.5
Tidak Setuju	2	6.2	6.2	18.8
Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	28.1
Setuju	7	21.9	21.9	50.0
Sangat Setuju	16	50.0	50.0	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang (50.0%), setuju sebanyak 7 orang (21.9%), ragu-ragu sebanyak 3 orang (9.4%), tidak setuju sebanyak 2 orang (6.2%) dan sebanyak 4 orang (12.5%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang (50.0%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan sangat setuju bahwa bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap organisasi intern.

Tabel 4.13
Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap auditi.
Pernyataan X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
	Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	18.8
	Setuju	15	46.9	46.9	65.6
	Sangat Setuju	11	34.4	34.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang (34.4%), setuju sebanyak 15 orang (46.9%), ragu-ragu sebanyak 3 orang (9.4%) dan sebanyak 3 orang (9.4%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (46.9%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap auditi.

Tabel 4.14
Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap masyarakat.
Pernyataan X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	12	37.5	37.5	37.5
	Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	40.6
	Setuju	4	12.5	12.5	53.1
	Sangat Setuju	15	46.9	46.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang (46.9%), setuju sebanyak 4 orang (12.5%), ragu-ragu sebanyak 1 orang (3.1%) dan sebanyak 12 orang (37.5%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang (46.9%). Jadi dapat disimpulkan

responden sangat setuju bahwa bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap masyarakat.

c. Variabel Y (Pertimbangan Tingkat Materialitas)

Tabel 4.15
Penentuan tingkat materialitas merupakan permasalahan auditor yang sangat penting.
Pernyataan Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	5	15.6	15.6	15.6
Ragu-Ragu	16	50.0	50.0	65.6
Setuju	10	31.2	31.2	96.9
Sangat Setuju	1	3.1	3.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.1%), setuju sebanyak 10 orang (31.2%), ragu-ragu sebanyak 16 orang (50.0%) dan sebanyak 5 orang (15.6%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 16 orang (50.0%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa penentuan tingkat materialitas merupakan permasalahan auditor yang sangat penting.

Tabel 4.16
Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan dalam melakukan audit selain pengalaman.
Pernyataan Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	6	18.8	18.8	18.8
Ragu-Ragu	9	28.1	28.1	46.9
Setuju	15	46.9	46.9	93.8
Sangat Setuju	2	6.2	6.2	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.2%), setuju sebanyak 15 orang (46.9%) ragu-ragu sebanyak 9 orang (28.1%) dan sebanyak 6 orang (18.8%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (46.9%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan setuju bahwa pengetahuan yang memadai sangat diperlukan dalam melakukan audit selain pengalaman.

Tabel 4.17
Resiko dari audit bagi perusahaan tergantung pada penetapan penting
tidaknya informasi dalam laporan keuangan.
Pernyataan Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	4	12.5	12.5	12.5
Ragu-Ragu	14	43.8	43.8	56.2
Setuju	14	43.8	43.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (43.8%), ragu-ragu sebanyak 14 orang (43.8%) dan sebanyak 4 orang (12.5%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 14 orang (43.8%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa resiko dari audit bagi perusahaan tergantung pada penetapan penting tidaknya informasi dalam laporan keuangan.

Tabel 4.18
Tingkat materialitas suatu perusahaan akan berbeda antara satu dengan lainnya.
Pernyataan Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	10	31.2	31.2	31.2
Ragu-Ragu	8	25.0	25.0	56.2
Setuju	12	37.5	37.5	93.8
Sangat Setuju	2	6.2	6.2	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.2%), setuju sebanyak 12 orang (37.5%), ragu-ragu sebanyak 8 orang (25.0%) dan sebanyak 10 orang (31.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (37.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa tingkat materialitas suatu perusahaan akan berbeda antara satu dengan lainnya.

Tabel 4.19
Penentuan tingkat materialitas merupakan hal penting dalam pengauditan laporan keuangan.
Pernyataan Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	6	18.8	18.8	18.8
Ragu-Ragu	8	25.0	25.0	43.8
Setuju	13	40.6	40.6	84.4
Sangat Setuju	5	15.6	15.6	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (15.6%), setuju sebanyak 13 orang (40.6%), ragu-ragu sebanyak 8 orang (25.0%) dan sebanyak 6 orang (18.8%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang

menyatakan setuju sebanyak 13 orang (40.6%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa penentuan tingkat materialitas merupakan hal penting dalam pengauditan laporan keuangan.

4.1.4 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

Tabel 4.20
Uji Validitas (X_1) Standar Audit
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X1.1	9.8750	4.565	.415	.662
Pernyataan X1.2	10.1250	4.306	.453	.640
Pernyataan X1.3	10.0000	4.581	.379	.683
Pernyataan X1.4	10.2188	3.338	.667	.483

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.20 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 4 (empat) butir pertanyaan pada variabel standar audit dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.21
Uji Validitas (X₂) Kode Etik
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X2.1	11.6562	8.362	.603	.635
Pernyataan X2.2	11.8438	6.652	.541	.660
Pernyataan X2.3	11.6875	9.448	.421	.720
Pernyataan X2.4	12.0625	6.577	.571	.637

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.21 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 4 (empat) butir pertanyaan pada variabel kode etik dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.22
Uji Validitas (Y) Pertimbangan Tingkat Materialitas
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	13.4375	9.351	.744	.885
Pernyataan Y.2	13.2500	8.194	.873	.855
Pernyataan Y.3	13.3438	9.652	.743	.888
Pernyataan Y.4	13.4688	8.709	.648	.908
Pernyataan Y.5	13.1250	7.790	.833	.864

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.22 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel pertimbangan tingkat materialitas dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* $> 0,60$ dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah $0,60$.

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.23
Uji Reliabilitas (X_1) Standar Audit
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.691	4

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.23 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,691 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 4 butir pernyataan pada variabel standar audit adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.24
Uji Reliabilitas (X_2) Kode Etik
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	4

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.24 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,727 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah

disajikan kepada responden yang terdiri dari 4 butir pernyataan pada variabel kode etik adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.25
Uji Reliabilitas (Y) Pertimbangan Tingkat Materialitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	5

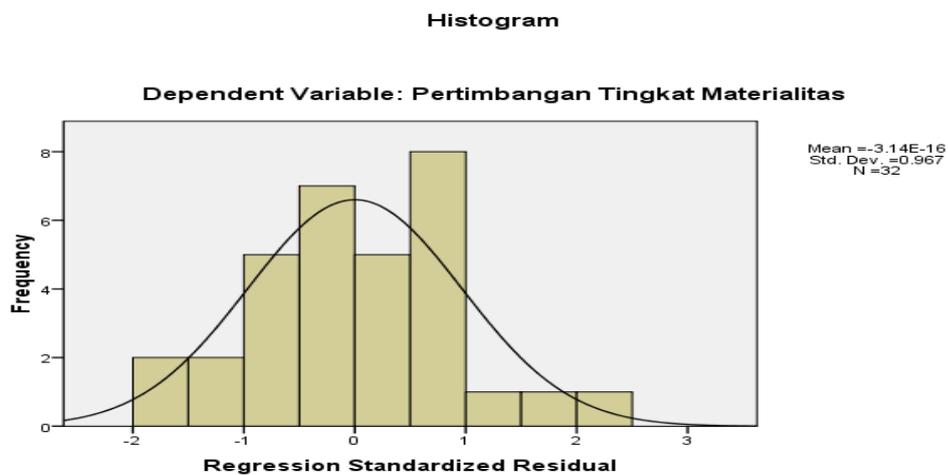
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.25 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,902 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel pertimbangan tingkat materialitas adalah reliabel atau dikatakan handal.

4.1.5 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



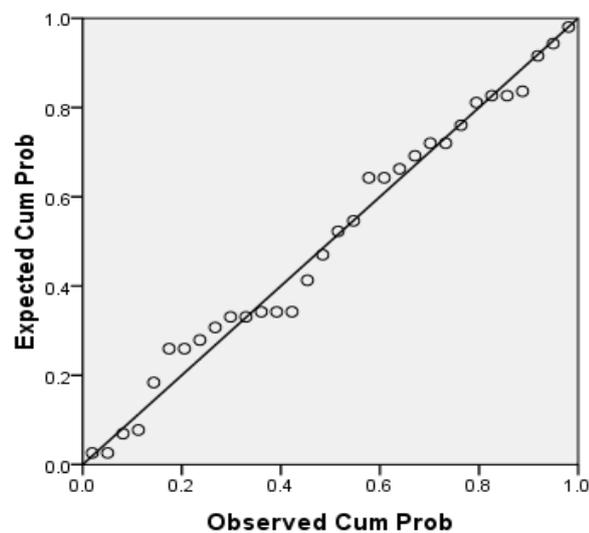
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pertimbangan Tingkat Materialitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asym.sig (2-tailed) > taraf\ nyata (\alpha = 0.05)$ maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.26
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.95594642
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.567
Asymp. Sig. (2-tailed)		.905

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.26 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogrov Smirnov* sebesar 0,905 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p = 0,905 > 0,05$).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 atau $VIF < 10$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.27
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.459	2.125	-.216	.831		
	Standar Audit	.527	.152	3.464	.002	.841	1.189
	Kode Etik	.638	.111	5.727	.000	.841	1.189

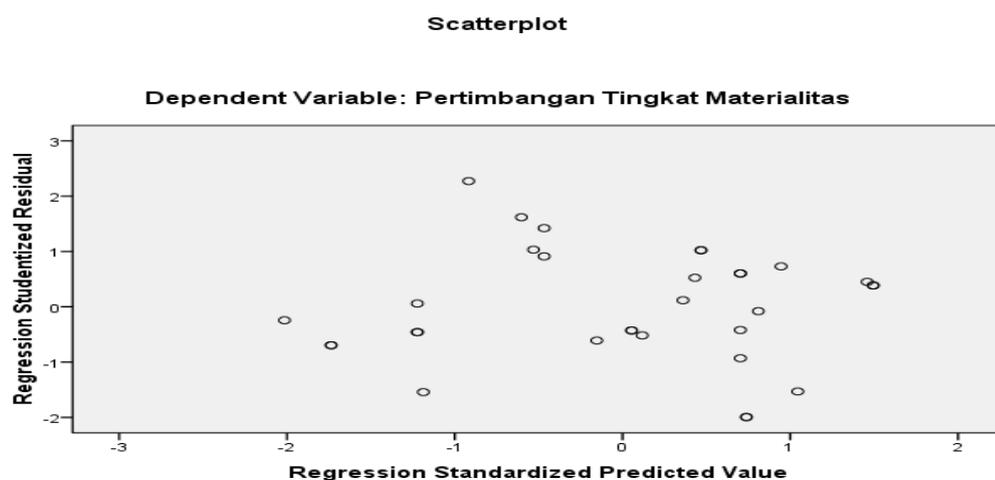
a. Dependent Variable: Pertimbangan Tingkat Materialitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.27 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah standar audit $1,189 < 10$ dan kode etik $1,189 < 10$, serta nilai *Tolerance* standar audit $0,841 > 0,10$ dan kode etik $0,841 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

4.1.6 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 4.28
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.459	2.125	-.216	.831	
	Standar Audit	.527	.152	3.464	.002	.841
	Kode Etik	.638	.111	5.727	.000	.841

a. Dependent Variable: Pertimbangan Tingkat Materialitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.28 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = -0,459 + 0,527 X_1 + 0,638 X_2 + e$.

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai pertimbangan tingkat materialitas (Y) adalah sebesar -0,459.

- b. Jika terjadi peningkatan standar audit 1, maka pertimbangan tingkat materialitas (Y) akan meningkat sebesar 0,527.
- c. Jika terjadi peningkatan kode etik sebesar 1, maka pertimbangan tingkat materialitas (Y) akan meningkat sebesar 0,638.

4.1.7 Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$).

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.29
Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	294.621	2	147.311	36.021	.000^a
	Residual	118.598	29	4.090		
	Total	413.219	31			

a. Predictors: (Constant), Kode Etik, Standar Audit

b. Dependent Variable: Pertimbangan Tingkat Materialitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.29 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 36,021 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,33 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini standar audit dan kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a atau hipotesis diterima.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.30
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.459	2.125	-.216	.831		
	Standar Audit	.527	.152	3.464	.002	.841	1.189
	Kode Etik	.638	.111	5.727	.000	.841	1.189

a. Dependent Variable: Pertimbangan Tingkat Materialitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.30 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh standar audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas, menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,464 > t_{tabel} 2,045$ dan signifikan $0,002 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan standar audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- 2) Pengaruh kode etik terhadap pertimbangan tingkat materialitas, menunjukkan bahwa $t_{hitung} 5,727 > t_{tabel} 2,045$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan kode etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

c. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.31
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 ^a	.713	.693	2.02227

a. Predictors: (Constant), Kode Etik, Standar Audit

b. Dependent Variable: Pertimbangan Tingkat Materialitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel tabel 4.31 di atas dapat dilihat angka *adjusted R Square* 0,693 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 69,3% pertimbangan tingkat materialitas dapat diperoleh dan dijelaskan oleh standar audit dan kode etik. Sedangkan sisanya $100\% - 69,3\% = 30,7\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti profesionalisme auditor, komitmen organisasi kantor akuntan publik, kompetensi audit dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Standar Audit Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,464 > t_{tabel} 2,045$ dan signifikan $0,002 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan standar audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tjandrawinata (2013), yang menunjukkan bahwa standar audit berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Auditor eksternal juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh kode etik profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI),

agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit.

4.2.2 Pengaruh Kode Etik Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 5,727 > t_{tabel} 2,045$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan kode etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sadewo (2018), yang menunjukkan bahwa kode etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Kode Etik Auditor mengamanatkan bahwa setiap auditor harus menjunjung tinggi dan mempertahankan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan independensi, ia akan bersikap netral dan tidak berpihak serta menghindari terjadinya benturan kepentingan. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan profesionalitas, ia akan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesidengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para

anggotanya. Oleh karena itu diperlukan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang disebut kode etik

4.2.3 Pengaruh Standar Audit dan Kode Etik Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hasil menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 36,021 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,33 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini standar audit dan kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a atau hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tjandrawinata (2013) dan Sadewo (2018), yang menunjukkan bahwa

Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh kode etik profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan profesionalitas, ia akan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Standar audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1, dimana $t_{hitung} 3,464 > t_{tabel} 2,045$ dan signifikan $0,002 < 0,05$. Serta kode etik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1, dimana $t_{hitung} 5,727 > t_{tabel} 2,045$ dan signifikan $0,000 < 0,05$.
2. Standar audit dan kode etik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT. Pelindo 1, dimana $F_{hitung} 36,021 > F_{tabel}$ sebesar 3,33 dan signifikan $0,000 < 0,05$.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian maka penulis mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda sehingga dapat mengetahui perbandingan antara hasil dalam penelitian ini.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pernyataan yang lebih baik dalam kuisisioner sehingga lebih dapat memberikan hasil yang diinginkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agus, S. (2014). *Auditing, Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: LPFE-UI.
- Arens, Alvin A., and James K. Loebbeck. 2013. *Auditing Pendekatan Terpadu Buku Satu*, Edisi Bahasa Indonesia. Penerjemah: Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat: Jakarta.
- Basri, Hasan. (2011). Pengaruh Dimensi Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor di KAP Kota Makassar).
- Boynton, Johnson, Kell. 2012. *Modern Auditing (Edisi 7) jilid 1*. John Wiley & Sons (Penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Firdaus. (2015), *Auditing. Pendekatan Pemahaman Secara Komprehensif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. *Metode Penelitian*. USU Press. Medan
- Juliandi dan Irfan, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu ilmu bisnis*, Ciptapustaka Media Perintis, Bandung.
- Messier, William F., Glover, Steven M., and Prawitt, Douglas F. 2015. *Auditing & Assurance Service: A Systematic Approach*. Buku Satu, Edisi Keempat, Salemba Empat: Jakarta.
- Mulyadi. (2012). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadewo, Dimas Aryo Damar. (2018). Pengaruh Etika Profesi Dan Kompetensi Audit Terhadap Kualitas Audit Di Kap Semarang.
- Situmorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lufti, 2014. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: Usu Press.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Tandiontong, Mathius. (2013). Pengaruh Faktor Komitmen Profesi Akuntan, Komitmen Organisasi Kantor Akuntan Publik Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Implementasi Audit Independen Atas Laporan Keuangan. Survei terhadap Akuntan yang bekerja sebagai Auditor pada KAP di Indonesia.

Tjandrawinata, Cindy Laurent. (2013). Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pemahaman Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya.

JURNAL :

Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59

Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. JUMANT, 11(1), 189-206.

Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. JEpa, 4(2), 119-132.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). *“Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”*. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Daulay, M. T. (2019). *Effect of Diversification of Business and Economic Value on Poverty in Batubara Regency*. KnE Social Sciences, 388-401.

Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. Jurnal Abdi Ilmu, 12(1), 55-65.

Herawaty dan Susanto. (2010). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.11 Nomor 1.

Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. JEpa, 3(2), 133-149.

Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

Kirana. (2010). Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Komputer Indonesia.

- Kusuma. (2012). Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. *Jumant*, 11(1), 67-80.
- Murtanto dan Marini. 2013. *Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan*, Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI, Oktober, hlm.790–805.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Sari, M. M. (2019). *Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus: Sub Sektor Rokok)*. *Jumant*, 11(2), 61-68.
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoenng Deli Medan*. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Sulistia (2013). “Analisis Pengendalian Internal (SPI) Klien Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan”. *Accounting Analysis Journal*, Vol 1(3).
- Wahyudi, H., dan Mardiyah, A. A. (2016). “Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.